

## **Sosialisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) di dusun Dadapbong kabupaten Bantul**

**Faizatun Riyado Hasanah<sup>1</sup>, Raden Jaka Sarwadhamana<sup>1</sup>, Yasmin Fadhilah<sup>1</sup>, Fitri Andriani<sup>2</sup>, Nisa Agustina Widya Astuti<sup>2</sup>, Ainun Jariah<sup>2</sup>, Susilo Setyo Wiguno<sup>2</sup>, Rodhotul Khofifah<sup>3</sup>, Dewi Septiyorini<sup>3</sup>, Nisa Agustina Widya Astuti<sup>2</sup>, Dini Rahmayani<sup>3</sup>, Sholihien<sup>3</sup>.**

<sup>1</sup>Program Studi S1 Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Alma Ata Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi S1 Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Alma Ata Yogyakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Komputer dan Teknik, Universitas Alma Ata Yogyakarta, Indonesia

Penulis korespondensi : Raden Jaka Sarwadhamana

E-mail : jaka.sarwadhamana@almaata.ac.id

Diterima: 16 Juli 2024 | Disetujui: 28 Juli 2024 | © Penulis 2024

### **Abstrak**

Program sosialisasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dusun Dadapbong, Kabupaten Bantul, bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program kesehatan nasional. Tim KKN Tematik 03 Universitas Alma Ata melakukan identifikasi permasalahan kesehatan yang dialami oleh masyarakat, penyuluhan terkait penggunaan dan kepemilikan BPJS di Dusun Dadapbong, serta distribusi materi informasi mengenai JKN. Hasil dari identifikasi, terdapat 105 keluarga yang memiliki BPJS, sementara 19 keluarga tidak memiliki atau tidak aktif menggunakannya. Penyakit umum yang dialami oleh warga di Dusun dadapbong, yaitu seperti maag, batuk, dan pilek. Sedangkan untuk penyakit degeneratifnya seperti hipertensi dan diabetes menjadi masalah kesehatan utama. Melalui penyuluhan dan distribusi materi informasi, kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan meningkat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki akses dan pemahaman terhadap layanan kesehatan di Dusun Dadapbong, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Tercatat ada 371 orang Dusun dadapbong yang terlibat dalam kegiatan ini. Metode pelaksanaan mencakup identifikasi permasalahan, penyuluhan langsung, dan distribusi materi informasi. Dengan demikian, program ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di Dusun Dadapbong.

**Kata kunci:** sosialisasi; jaminan kesehatan nasional (JKN); dusun dadapbong; penyuluhan kesehatan; partisipasi masyarakat.

### **Abstract**

The socialization program for the implementation of the National Health Insurance (JKN) in Dadapbong Hamlet, Bantul Regency, aims to enhance understanding and participation of the community in the national health program. The thematic Community Service Program Team 03 from Alma Ata University identified health issues experienced by the community, provided counseling on the usage and ownership of BPJS in Dadapbong Hamlet, and distributed informational materials regarding JKN. The identification revealed 105 families enrolled in BPJS, while 19 families either didn't have or weren't actively using it. Common illnesses in Dadapbong Hamlet include gastritis, cough, and colds, while degenerative diseases such as hypertension and diabetes are major health concerns. Through counseling and information distribution, community awareness of the importance of health insurance increased. These steps are expected to improve access to and understanding of healthcare services in Dadapbong Hamlet, and to foster active participation in sustainable development. A total of 371 individuals from Dadapbong Hamlet participated in these activities. Implementation methods

included issue identification, direct counseling, and material distribution. Thus, this program positively contributes to improving the welfare and health of the community in Dadapbong Hamlet.

**Keywords:** socialization; national health insurance (JKN); dadapbong hamlet; health counseling; community participation.

---

## PENDAHULUAN

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN (Erna & Sumaryono, 2020). JKN memiliki tujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia, yang berarti penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Program Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, yang menyatakan kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terbatas oleh biaya (Nuurjannah, 2021). Pada tahun 2014, JKN dimulai dengan kewajiban pendaftaran ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Undang-Undang BPJS sudah disahkan dua tahun sebelumnya melalui UU nomor 24 tahun 2011, sementara undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menjadi rujukan sudah lebih dulu diresmikan melalui UU nomor 40 tahun 2004. JKN menyediakan pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif), termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya. Sebagai program pemerintah, JKN bertepatan dengan Hari Kesehatan Sedunia dan merupakan bagian dari perkembangan global dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC), yang menandakan bahwa seluruh penduduk tanah air tercinta harus tercakup dalam kepesertaan JKN (Sinaga, Ika Rahma Ginting, Kusumaratna, & Marthias, 2021).

Untuk memastikan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) tercover atau terlindungi di dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah telah mengatur kewajiban pendaftaran ke BPJS Kesehatan dan menetapkan sanksi untuk pemutusan kewajiban pendaftaran. Selain itu, pemerintah juga menyediakan informasi kepada peserta JKN mengenai hak dan kewajiban, prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya, saldo jaminan hari tua dan pengembangannya, besar hak pensiun, dan pelaksanaan program Jaminan Sosial (Putri & Suryawati, 2022). Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu bagian dari sistem pengelolaan kesehatan yang mencakup pelayanan publik dan pengelolaan privat, serta mengatur pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, dimulai pada tahun 2014 dan sejak itu telah membantu mengubah sistem kesehatan dan pembiayaan di Indonesia. Hingga saat ini, sekitar 66,11% penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN (Rohmatullailah et al., 2021).

Implementasi JKN di Indonesia telah mengalami beberapa hambatan, seperti permasalahan dalam pengadaan dan penyimpanan obat yang tidak sesuai dengan pedoman manajemen ketersediaan obat pada fasilitas kesehatan primer, dan biaya klaim rumah sakit yang sering mengalami keterlambatan karena berkas pasien yang belum lengkap (Suprianto & Mutiarin, 2017). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang pemotongan pajak rokok sebagai kontribusi dukungan untuk Program JKN, yang diharapkan akan membantu pemerintah daerah tidak lagi mengalami kesulitan dalam menganggarkan kewajiban kontribusi iuran PBI JK. Untuk memperbaiki implementasi JKN, pemerintah dan kementerian terkait telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi data kepesertaan PBI JK dengan BPJS Kesehatan untuk memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan tingkat kepatuhan. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 untuk mengikutsertakan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam hal penganggaran, yang diharapkan akan membantu

Sosialisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) di dusun Dadapbong kabupaten Bantul

mencapai ekosistem JKN yang sehat dan berkelanjutan (Sabrina, 2015) JKN di Indonesia masih memiliki hambatan, seperti ketersediaan pelayanan yang cukup, biaya klaim yang mungkin mengalami keterlambatan, serta pengadaan dan penyimpanan obat yang tidak sesuai dengan pedoman manajemen ketersediaan obat pada fasilitas kesehatan primer (Mariyam, 2018). Tetapi dengan perubahan dan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi data, serta peningkatan tingkat kepatuhan, JKN di Indonesia dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia dalam sistem jaminan kesehatan.

Melalui penelitian pengabdian masyarakat KKN Tematik 03 Universitas Alma Ata di Dusun Dadapbong, Bantul, menjadi salah satu upaya konkret untuk mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam konteks implementasinya di Indonesia. Dalam penelitian ini Tim KKN Tematik 03 memanfaatkan data dan informasi yang tersedia terkait dengan implementasi JKN di Indonesia. Penulis menggunakan data mengenai persentase penduduk yang telah menjadi peserta JKN, alasan tidak memiliki BPJS serta data lainnya. Dengan memahami hambatan yang dihadapi dalam implementasi JKN, Tim KKN Tematik 03 Alma Ata dapat merancang kegiatan sosialisasi yang tepat dan relevan untuk Dusun Dadapbong. Salah satunya, memberikan informasi tentang prosedur pendaftaran ke BPJS Kesehatan, hak dan kewajiban peserta JKN, manfaat yang diperoleh dari program tersebut, dan langkah-langkah yang dapat diambil jika mengalami masalah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan melalui JKN. Selain itu, Tim KKN Tematik 03 memberikan pemahaman kepada masyarakat di Dusun Dadapbong mengenai peran serta dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mendukung program tersebut.

Melalui kegiatan sosialisasi yang terarah dan informatif, diharapkan masyarakat Dusun Dadapbong dapat memahami pentingnya JKN dan meningkatkan partisipasi mereka dalam program tersebut. Selain itu, Tim KKN Tematik 03 juga dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa dan instansi terkait mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di desa tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

## **METODE**

Sosialisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dusun Dadapbong, Kabupaten Bantul memiliki tujuan yang penting dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program kesehatan nasional. Langkah-langkah yang dilakukan dalam sosialisasi JKN di Dusun Dadapbong yaitu :

1. Identifikasi Lokasi

Lokasi pelaksanaan KKN ditetapkan oleh Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian (LP3M) Universitas Alma Ata di Padukuhan Dadapbong, Sendangsari, Kabupaten Bantul, DIY. Durasi pelaksanaan KKN di lokasi ini yaitu dari 01 Februari sampai 31 Maret 2024.

2. Peninjauan Lokasi dan Analisis Kebutuhan

Setelah lokasi ditentukan, tim sosialisasi melakukan peninjauan langsung ke Dusun Dadapbong. Tujuan peninjauan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat setempat. Tim dapat bertemu dengan tokoh masyarakat, kepala desa, serta warga setempat untuk mendiskusikan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi terkait akses dan pemahaman terhadap JKN.

3. Perencanaan Program Sosialisasi JKN

Berikutnya, berdasarkan hasil peninjauan lokasi, setelah melakukan peninjauan dilakukan membuat rencana program sosialisasi JKN yang tepat sasaran dan efektif. Langkah-langkah ini mencakup:

- 1) Bertemu dan berkenalan dengan kepala Padukuhan serta tokoh warga.

- 2) Meninjau kondisi di lingkungan sekitar Padukuhan Dadapbong bersama tokoh warga.
- 3) Menentukan solusi permasalahan di lokasi dengan rencana pelaksanaan program kerja dengan menampung masukan dari tokoh warga.
- 4) Membuat rencana penyusunan program kerja di lokasi.

#### 4. Pelaksanaan Program Sosialisasi

Setelah perencanaan selesai, tahap berikutnya adalah pelaksanaan program sosialisasi JKN di Dusun Dadapbong. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan anggota tim Kelompok 03 KKN-T. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Identifikasi Permasalahan Kesehatan: Berdasarkan temuan dari peninjauan lokasi, dapat mengidentifikasi permasalahan kesehatan yang dominan di Dusun Dadapbong, seperti akses terhadap layanan kesehatan, biaya kesehatan, atau pemahaman terhadap manfaat JKN.
- 2) Penyuluhan di Dusun Dadapbong: Mengadakan pertemuan publik di balai RT. 04 untuk menyampaikan informasi tentang JKN dan menjawab pertanyaan dari masyarakat, serta untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan dan cara menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia.
- 3) Distribusi Materi Informasi JKN: Mendistribusikan brosur, leaflet, atau materi promosi lainnya kepada Kader, Ketua Dasawisma, Pemuda dan masyarakat Dusun Dadapbong agar mereka dapat mempelajari informasi tentang JKN dengan lebih mendalam.

#### 5. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Setelah pelaksanaan program sosialisasi, TIM KKN melakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas program dan mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan. Evaluasi dilakukan melalui analisis data partisipasi masyarakat dalam program JKN. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk menyusun rencana tindak lanjut guna memperbaiki atau meningkatkan program sosialisasi di masa mendatang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan survei yang dilakukan di Dusun Dadapbong, Kabupaten Bantul. Tim KKN Tematik 03 Alma Ata mengidentifikasi populasi ada sebanyak 371 penduduk, mayoritas terdiri dari orang tua dengan usia rata-rata mencapai 204 orang, sedangkan anak-anak berjumlah 167 orang. Rentang usia penduduk dimulai dari yang termuda yang berusia 1,6 tahun hingga yang tertua mencapai usia 106 tahun, terdiri dari 199 laki-laki dan 172 perempuan.

**Tabel 1.** Identifikasi Penduduk

Indikator	Jumlah
Jumlah Penduduknya	371
Laki-Laki	199
Perempuan	172
Orang Tua	204
Anak	167
Usia Paling Tua	106 Tahun
Usia Paling Muda	1,6 Tahun

Berdasarkan data tabel identifikasi penduduk di atas, penduduk yang memiliki BPJS sebanyak 105 keluarga. Namun, masih ada keluarga yang tidak memiliki BPJS atau tidak aktif menggunakan BPJS sebanyak 19 keluarga. Alasan utama tidak memiliki BPJS antara lain karena ribet dalam pengurusannya, belum mendaftar, keluar dari pekerjaan, tidak tahu cara mengaktifkan kembali, serta tidak pernah dipakai dan tidak diperpanjang. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk

Sosialisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) di dusun Dadapbong kabupaten Bantul

meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas terhadap program JKN di desa tersebut, serta memberikan edukasi tentang pentingnya memiliki BPJS sebagai jaminan kesehatan yang dapat membantu dalam mendapatkan akses kesehatan.

BPJS Kesehatan menyediakan asuransi kesehatan sesuai dengan iuran yang dibayarkan oleh masing-masing penerima manfaat, dan setiap warga negara wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Program ini menyediakan asuransi kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai fasilitas kesehatan, selama penerima manfaat melalui prosedur yang sudah ditentukan. Anggota BPJS Kesehatan wajib membayar iuran per bulan sesuai dengan program yang mereka pilih. BPJS Kesehatan juga memiliki program BPJS Kesehatan PBI untuk penduduk miskin dan rentan, yang tidak perlu membayar iuran wajib bulanan karena sudah ditanggung oleh pemerintah (Astuti, 2020).

**Tabel 2.** Identifikasi Kepemilikan BPJS

<b>Indikator</b>	<b>Data</b>
Punya BPJS	105 Keluarga
Punya BPJS Tapi Tidak Aktif	11 Keluarga
Tidak Punya BPJS	8 Keluarga
Alasan Tidak Punya Bpjs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Mau ribet</li> <li>• Tidak pernah dipakai dan tidak diperbarui</li> <li>• Dahulu kerja di pabrik dan keluar dari pabrik, ingin mengaktifkan tetapi tidak mengetahui caranya</li> <li>• Bpjsnya sudah tidak aktif</li> </ul>

Dari data yang diperoleh, hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas terhadap program JKN di desa tersebut, serta memberikan edukasi tentang pentingnya memiliki BPJS sebagai jaminan kesehatan yang dapat membantu mengurangi beban biaya kesehatan. Upaya meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dusun Dadapbong merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa seluruh penduduk dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia secara optimal. Dengan memberikan edukasi tentang manfaat dan cara menggunakan BPJS sebagai jaminan kesehatan, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan yang diperlukan tanpa harus khawatir dengan biaya yang akan dikeluarkan (Tawai, Afriadi, & Yusuf, 2023). Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan dapat membantu mengubah pola pikir masyarakat terkait investasi dalam kesehatan sebagai bagian dari upaya mempertahankan kesejahteraan dan produktivitas hidup.

Dengan demikian, sosialisasi yang efektif dan terus-menerus tentang program JKN dan manfaat BPJS diharapkan dapat menjadi landasan bagi perubahan positif dalam sistem kesehatan di Dusun Dadapbong. Upaya meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dusun Dadapbong merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa seluruh penduduk dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia secara optimal. Dengan memberikan edukasi tentang manfaat dan cara menggunakan BPJS sebagai jaminan kesehatan, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan yang diperlukan tanpa harus khawatir dengan biaya yang akan dikeluarkan (Norjani, 2022). Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan dapat membantu mengubah pola pikir masyarakat terkait investasi dalam kesehatan sebagai bagian dari upaya mempertahankan kesejahteraan dan produktivitas hidup. Dengan demikian, sosialisasi yang efektif dan terus-menerus tentang program JKN dan manfaat BPJS diharapkan dapat menjadi landasan bagi perubahan positif dalam sistem kesehatan di Dusun Dadapbong.

Melihat kondisi tersebut, kelompok KKN Tematik 03 Universitas Alma Ata membuat program kerja mengenai permasalahan tersebut, yaitu sosialisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan

Sosialisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) di dusun Dadapbong kabupaten Bantul

Nasional (JKN) di Dusun Dadapbong, Bantul, sekaligus membantu mewujudkan program dari pemerintah kabupaten Bantul untuk meningkatkan akses layanan kesehatan. Tahapan realisasi program kerja tersebut diantaranya yaitu :

#### 1. Identifikasi Permasalahan Kesehatan

Dalam melihat kondisi kesehatan masyarakat setempat merupakan langkah awal yang penting untuk mengidentifikasi permasalahan yang dominan terjadi terkait dengan aspek kesehatan masyarakat. Dengan memahami secara mendalam tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat, langkah-langkah yang lebih efektif dan tepat sasaran dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan mereka.

**Tabel 3.** Identifikasi Kesehatan Penduduk

Indikator	Data
Penyakit Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maag</li> <li>• Batuk</li> <li>• Pilek</li> <li>• Demam</li> <li>• Alergi</li> <li>• Sakit kepala</li> <li>• Mual &amp; muntah</li> <li>• Asam lambung</li> <li>• Diare non infeksius</li> <li>• Penyakit kulit (panu, jerawat, biang keringat &amp; luka bakar)</li> <li>• Virus tikus</li> <li>• Migren</li> </ul>
Penyakit Degeneratif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asam urat</li> <li>• Batu ginjal</li> <li>• Hipertensi</li> <li>• Diabetes</li> <li>• Asma</li> <li>• Darah rendah</li> <li>• Gangguan jiwa</li> <li>• Osteoporosis</li> </ul>

Berdasarkan identifikasi kesehatan melalui survey penduduk, penyakit-penyakit umum seperti maag, batuk, pilek, demam, alergi, sakit kepala, mual & muntah, asam lambung, diare non-infeksius, dan penyakit kulit menjadi masalah kesehatan yang sering dihadapi oleh masyarakat di Dusun Dadapbong. Selain itu, ada beberapa kasus penyakit yang memerlukan perhatian khusus, seperti penyakit virus tikus, migren. Adapun penyakit degeneratif yang dialami oleh warga seperti asam urat, batu ginjal, hipertensi, diabetes, asma, darah rendah, gangguan jiwa, dan osteoporosis juga merupakan tantangan kesehatan yang dihadapi oleh penduduk Dusun Dadapbong. Penyakit-penyakit ini memerlukan penanganan yang lebih serius dan pemantauan yang teratur untuk mencegah komplikasi yang lebih serius di masa depan.

Dengan sistem jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, peserta dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan lebih efisien. Sistem jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan menjamin kesehatan bagi peserta dengan dua kelompok: PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan bukan PBI. BPJS Kesehatan juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat, sehingga masyarakat

pengguna layanan BPJS Kesehatan merasa dampak yang sama dalam menggunakan pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan Sistem jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan memberikan manfaat kepada peserta, termasuk pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitative (Solechan, 2019).

## 2. Penyuluhan JKN di Dusun Dadapbong

Penyuluhan di Dusun Dadapbong merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang jaminan kesehatan, khususnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pertemuan publik di balai RT.04 Dusun Dadapbong menjadi platform utama untuk menyampaikan informasi dan menjawab pertanyaan masyarakat seputar program JKN. Pertemuan publik diadakan dengan tujuan menyampaikan informasi yang jelas dan akurat tentang manfaat dan prosedur yang terkait dengan JKN. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami secara mendalam tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan, terutama dalam menghadapi risiko kesehatan yang tidak terduga.

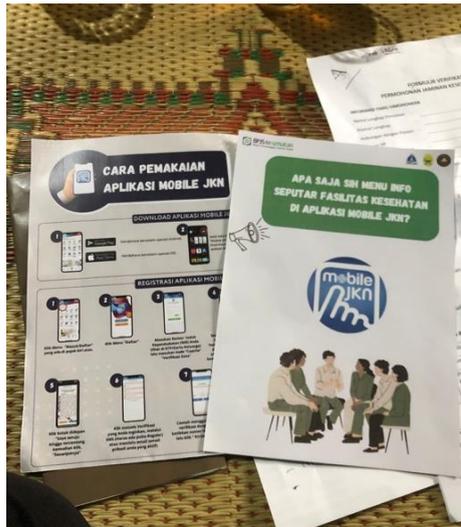


**Gambar 1.** Sosialisasi JKN di Dusun Dadapbong

Melalui pertemuan ini, masyarakat diberi kesempatan untuk bertanya langsung tentang aspek-aspek yang mereka tidak pahami atau butuh klarifikasi. Selain itu, penyuluhan juga dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang cara menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia. Informasi ini sangat penting karena seringkali masyarakat tidak sepenuhnya memahami prosedur yang harus diikuti saat menggunakan fasilitas kesehatan (Pramana & Chairunnisa Widya Priastuty, 2023). Dengan memberikan penyuluhan yang komprehensif, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya diri dan terampil dalam memanfaatkan layanan kesehatan yang ada. Dalam penyuluhan tersebut, pendekatan yang ramah dan mudah dipahami sangat diperlukan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, materi penyuluhan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masyarakat di Dusun Dadapbong.

## 3. Distribusi Materi Informasi JKN Pada 18 Februari 2024

Distribusi materi informasi tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan langkah yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Dadapbong tentang kepemilikan BPJS dan penggunaan BPJS mobile. Brosur, leaflet, dan materi lainnya dapat menjadi sumber referensi yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mempelajari informasi tentang JKN secara lebih mendalam.



**Gambar 2.** Brosur Informasi JKN Sebagai Media Sosialisasi

Distribusi materi ini dilakukan dengan tujuan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat tentang manfaat, prosedur, dan ketentuan yang terkait dengan JKN. Materi informasi tersebut juga dapat membantu dalam menjelaskan secara visual dan komprehensif berbagai aspek yang terkait dengan program jaminan kesehatan, sehingga masyarakat dapat memahaminya dengan lebih baik (Sarauw, Nompo, & Arvia, 2021).

Penyuluhan di Dusun Dadapbong merupakan upaya untuk memberikan informasi yang mendalam tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat. Tahapan realisasi program tersebut meliputi identifikasi penduduk, identifikasi kepemilikan BPJS, identifikasi kesehatan penduduk, penyuluhan langsung serta distribusi materi informasi JKN. Program tersebut berhasil disosialisasikan secara efektif, menghasilkan kesadaran yang lebih tinggi di kalangan masyarakat tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan.



**Gambar 3.** Foto Bersama Warga di Balai RT.04 Dusun Dadapbong

Dengan adanya kesadaran yang meningkat, masyarakat diharapkan dapat terus mendukung dan memanfaatkan program-program yang telah disosialisasikan, baik terkait pengelolaan sampah maupun dalam memanfaatkan jaminan kesehatan yang tersedia. Hal ini merupakan langkah positif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Melalui program sosialisasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dusun Dadapbong, Kabupaten Bantul, tim KKN Tematik 03 Universitas Alma Ata memberikan hasil yang

Sosialisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) di dusun Dadapbong kabupaten Bantul

positif. Evaluasi pelaksanaan kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan, terutama melalui BPJS, sebagai upaya untuk mengurangi beban biaya kesehatan. Dengan identifikasi permasalahan kesehatan yang dilakukan dapat menentukan langkah-langkah penyuluhan yang tepat sasaran, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami manfaat dan prosedur yang terkait dengan JKN. Secara kuantitatif, terdapat peningkatan jumlah peserta yang memiliki BPJS dan aktif menggunakannya setelah program sosialisasi dilakukan. Terlihat dari 19 keluarga yang awalnya tidak memiliki atau tidak aktif menggunakan BPJS, sebagian besar di antaranya berhasil diaktifkan atau mendaftar sebagai peserta baru. Selain itu, penyuluhan langsung dan distribusi materi informasi juga berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang berbagai penyakit umum dan degeneratif yang sering terjadi di desa tersebut, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, saran yang diberikan adalah melakukan pendekatan lebih intensif dan personal dalam membantu masyarakat dalam proses pendaftaran dan aktivasi BPJS. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan koordinasi dengan pihak terkait, seperti BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah, untuk memberikan bantuan atau insentif bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dalam membayar iuran BPJS. Ide pengabdian selanjutnya dapat meliputi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang bertugas sebagai fasilitator atau perantara dalam membantu proses pendaftaran BPJS. Selain itu, program sosialisasi juga dapat diperluas ke wilayah-wilayah lain di Kabupaten Bantul yang memiliki tingkat aksesibilitas terhadap layanan kesehatan yang rendah. Dengan upaya yang berkelanjutan dan terus-menerus, diharapkan program sosialisasi JKN ini dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Dusun Dadapbong, serta menjadi contoh yang dapat diadopsi oleh desa-desa lain di Indonesia.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Alma Ata dan LP3M Universitas Alma Ata atas bantuan finansial yang memungkinkan pelaksanaan KKN Tematik di padukuhan Dadapbong dan kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Sendangsari, Kepala Dukuh Dusun Dadapbong, serta seluruh masyarakat Dadapbong yang telah turut berkontribusi dalam kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan KKN Tematik ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Astuti, E. K. (2020). Peran BPJS Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 01(01), 55–65.
- Erna, & Sumaryono, S. (2020). Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (Jkn Kis) Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin. *CENDEKIA Jaya*, 2(2), 96–113. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v2i2.75>
- Mariyam, S. (2018). Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Perspektif Hukum Asuransi). *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 7(2), 36–42.
- Norjani, N. (2022). Analisis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(1), 864–869. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v6i1.3685>
- Nuurjannah, N. Y. (2021). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 13(2), 63–77.
- Pramana, P., & Chairunnisa Widya Priastuty. (2023). Perspektif Masyarakat Pengguna BPJS Kesehatan mengenai Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional*, 3(1), 30–41. <https://doi.org/10.53756/jjkn.v3i1.98>
- Putri, S. S., & Suryawati, C. (2022). Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Aspek Kepesertaan untuk Mencapai Universal Health Coverage. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 21(2), 118–123. <https://doi.org/10.14710/mkmi.21.2.118-123>

- Rohmatullailah, D., Agustina, D., Rahmansyah, F., Trisna, N. K., Anasta, N., Fauziyyah, R., ... Kesehatan Masyarakat, F. (2021). Peningkatan Pengetahuan tentang JKN dengan Sosialisasi dan Pembentukan Kader JKN Kota Bogor. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat (Pengmaskemas)*, 1(2), 110–118.
- Sabrina, Q. (2015). Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD Haji Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(2), 54–62.
- Sarauw, A., Nompo, R., & Arvia, A. (2021). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Penyakit Benigna Prostate Hyperplasia (Bph) Terhadap Pengetahuan Pasien Di Ruang Bedah Pria RSUD Jayapura. *Sentani Nursing Journal*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.52646/snj.v3i1.35>
- Sinaga, E. S. S., Ika Rahma Ginting, Kusumaratna, R. K., & Marthias, T. (2021). Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. *Skripsi*, 10(03), 1–9.
- Solechan, S. (2019). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 686–696. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.686-696>
- Suprianto, A., & Mutiarin, D. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 71–107. <https://doi.org/10.18196/jgpp.4172>
- Tawai, A., Afriadi, Z., & Yusuf, M. (2023). Model Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dinas Kesehatan Kota Kendari. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 275–284.